

Gotong Royong as the Core Principle of Pancasila and Its Relevance as Peace Education in Social Studies Learning

Sariyatun

Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret
sariyatun@staff.uns.ac.id

Article History

accepted 10/04/2021

approved 12/04/2021

published 20/04/2021

Abstract

This paper seeks to investigate the position of gotong royong (mutual cooperation) in Pancasila and its relevance as peace education in social studies learning. This paper is an effort as well as an offer to build an inclusive culture in order to solve the problems of bullying and intolerance in education. This paper used qualitative method with literature study approach by analyzing literatures related to the research corpus, i.e. Pancasila, mutual cooperation, peace education, and social studies learning. The results showed that mutual cooperation as the core principle of Pancasila is a treasure of Indonesian culture which is closely related to the substance of divine values, deliberation and consensus, kinship, justice and tolerance (humanitarianism). These values have strategic values to be conveyed in the social studies learning process in the classroom in order to foster a culture of peace for students.

Keywords: *mutual cooperation, Pancasila, peace education, social studies learning*

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk menelisik bagaimana posisi gotong royong dalam Pancasila dan bagaimana relevansinya sebagai pendidikan perdamaian dalam pembelajaran IPS. Hal ini dilakukan sebagai upaya sekaligus tawaran untuk membangun budaya inklusi guna menyelesaikan permasalahan perundungan dan intoleransi dalam dunia pendidikan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis pada literatur yang berkaitan dengan korpus penelitian, yakni Pancasila, gotong royong, pendidikan perdamaian, dan pembelajaran IPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gotong royong sebagai nilai dasar Pancasila merupakan khasanah kebudayaan Nusantara yang erat kaitannya dengan substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan). Nilai-nilai tersebut memiliki nilai strategis untuk disampaikan dalam proses pembelajaran IPS di kelas guna menumbuhkan budaya damai bagi peserta didik.

Kata kunci: *gotong royong, Pancasila, pendidikan perdamaian, pembelajaran IPS*

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series
<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284
e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Gotong royong merupakan khasanah kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat bahkan sebelum Indonesia lahir. Namun dewasa ini, realitas perundungan dan intoleransi yang terjadi dalam dunia pendidikan seakan menjauhkan masyarakat Indonesia dengan nilai gotong royong itu sendiri. Dalam laporan PISA 2018, lebih dari 40% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan. Presentase ini lebih tinggi dari rata-rata negara anggota OECD sebesar 23% (OECD, 2018). Selanjutnya, The Global School-Based Health Survey tahun 2015 memaparkan bahwa 32% siswa usia 13 hingga 17 tahun di Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan 20.6% siswa pernah menjadi korban perundungan di sekolah (WHO, 2015). Mengenai intoleransi, PPIIM Convey 2018 yang melakukan riset tentang sikap intoleransi di sekolah menyatakan bahwa 87% guru dan dosen serta 86% siswa dan mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang. Selain itu 33% siswa setuju bahwa tindakan intoleran terhadap minoritas bukan sebuah permasalahan (Convey Indonesia, 2018). Dalam laporan BNPT tahun 2017 (Aziz, 2018) menunjukkan 39% mahasiswa di 15 provinsi bersimpati pada gerakan dan ideologi transnasional. Fenomena intoleransi dan perundungan tersebut menunjukkan bahwa eksklusifitas dalam pergaulan di kalangan pelajar masih menjadi permasalahan, dimana budaya gotong royong dan budaya inklusif belum terinternalisasikan secara efektif dalam proses pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, budaya gotong royong dan budaya inklusif merupakan tumpuan dalam menciptakan stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan bangsa, sehingga membangun budaya tersebut di tengah masyarakat adalah sebuah keharusan. Namun pada kenyataannya, budaya gotong royong dan kemajemukan yang selama ini melekat sebagai identitas bangsa seakan mulai luntur yang ditandai dengan adanya persaingan kelompok, saling menyalahkan, saling curiga, perselisihan, konflik bahkan bentrok fisik antar kelompok masyarakat terus bermunculan. Iqbal (2014) menyebutkan tiga kecenderungan yang sering dihadapi masyarakat multikultural yaitu: 1) mengidap potensi konflik yang kronis di dalam hubungan antar kelompok; 2) pelaku konflik melihat sebagai *all out war*; 3) proses integrasi sosial lebih banyak terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh kelompok lain. Untuk mengatasi permasalahan ini setiap warga negara harus dididik, ditanamkan dan dibina dengan semangat kedamaian hidup dalam keragaman, menghormati dan menghargai perbedaan, tetap saling bekerja sama dalam urusan sosial, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dalam iklim yang kondusif sebagai kekuatan karakter bangsa. Upaya pembinaan itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah dengan menghadirkan kembali nilai gotong royong dalam Pancasila sebagai upaya penanaman budaya inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai pendidikan perdamaian (*peace education*) dalam proses pembelajaran dalam kelas, salah satunya melalui pembelajaran IPS. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berupaya untuk menelisik bagaimana posisi gotong royong dalam Pancasila dan bagaimana relevansinya sebagai pendidikan perdamaian dalam pembelajaran IPS. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun budaya inklusi dalam pendidikan sebagai tawaran untuk menyelesaikan permasalahan perundungan dan intoleransi dalam dunia pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Menurut John W Cresswell (2012) langkah-langkah yang digunakan dalam menggali data dalam penelitian studi pustaka adalah: 1) mengidentifikasi istilah-istilah kunci, penulis mengidentifikasi literatur yang digunakan sebagai sumber data, demikian pula artikel dan buku yang berkaitan dengan

Pancasila, pendidikan perdamaian, dan pembelajaran IPS; 2) menempatkan literatur, penulis mengurutkan sumber literatur berdasarkan kebaruan ide-idenya dan relevansinya dengan arah penulisan peneliti; 3) mengevaluasi dan memilih literatur secara kritis; penulis menganalisis artikel dan buku yang berkaitan dengan korpus penelitian, 4) mengatur literatur; dan 5) menulis tinjauan pustaka. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bagaimana posisi gotong royong dalam Pancasila dan bagaimana relevansinya sebagai pendidikan perdamaian dalam pembelajaran IPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gotong Royong sebagai Nilai Dasar Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir melalui proses demokrasi partisipatif bersifat musyawarah dan mufakat yang dapat ditelusuri dalam catatan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, ketua BPUPK, Dr. Rajiman, mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota peserta sidang: “Apa dasar Negara Indonesia merdeka?” Pertanyaan ini menjadi inti pidato yang diminta untuk disiapkan dan disampaikan oleh seluruh peserta dalam sidang. Dari naskah pidato para peserta sidang, gagasan, ide dan pandangan dasar Indonesia merdeka dapat dikelompokkan ke dalam tiga besar, yakni dasar Kebangsaan, dasar Agama Islam dan dasar Jiwa Asia Timur Raya (Kusuma, 2004).

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno memberikan gagasannya mengenai dasar Indonesia merdeka yaitu lima sila atau Pancasila. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut kemudian disepakati sebagai hari lahir Pancasila. Menurut Mohamad Hatta, pidato Soekarno dinilai kompromis, dapat menghilangkan pertentangan yang mulai menajam antara gagasan yang mengusulkan Negara Islam dan para peserta sidang yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama (Effendi, 2013).

Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa Pancasila merupakan falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) yang dimaksudkan untuk menjadi dasar negara. Pancasila juga dimaksudkan sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*), dimana nilai-nilai Pancasila merupakan cara bangsa Indonesia dalam memandang dan memaknai dunia serta kehidupan. Pancasila beradai di dunia sehari-hari yang dihuni oleh masyarakat, yang dibentuk oleh sistem kultural yang telah menyejarah (Arif, 2018). Tanpa kehadiran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, sebagai hasil dari konsensus dan kesepakatan bersama, maka arah dan jalannya kehidupan bangsa akan terganggu. Pancasila haruslah dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi napas dari segala peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Nilai-nilai Pancasila hendaknya menjelma secara aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Latif, 2015). Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 secara gamblang Soekarno menjelaskan:

Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma ini tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma; tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya Panca-Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang tiga itu? Berpuluh-

puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah dahulu yang saya namakan socio-nationalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economischedemocratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuantuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadi koesoema buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. “Gotong-royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe! Gotong royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantubinantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua Holupis-kuntul-baris buatkepentingan bersama! Itulah gotong royong.”

Dalam cuplikan pidato diatas, Soekarno memeras lima dasar tersebut menjadi Trisila, yaitu: *socio-nationalism* (perasan dari kebangsaan dan kemanusiaan), *socio-democratie* (perasan dari keadilan sosial dan kerakyatan), dan Ketuhanan. Tidak berhenti di situ, Soekarno memeras lagi Trisila tersebut ke dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. Sehingga dapat dikatakan bahwa sari pati dari Pancasila adalah gotong royong.

Gotong royong dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan sosial kolektif, namun makna terdalam dari gotong royong dapat dijelaskan sebagai falsafah hidup yang mengedepankan kehidupan kolektif. Menurut Bowen (1986) gagasan gotong royong sebagai perjuangan nasional yang melibatkan kelompok-kelompok yang terkait secara horizontal paling ringkas diungkapkan dengan akronim Nasakom, yang dibentuk dari kata nasionalisme, agama, dan komunisme, serta menandakan strategi politik mengaitkan tiga kelompok masyarakat dalam perjuangan bersama.

Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah. Didalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah ‘Royong’ dan ‘Gotong’ (Kartodirdjo, 1987). Maka setiap individu

yang memegang prinsip dan memahami roh gotong royong secara sadar bersedia melepaskan sifat egois. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan. Singkatnya, gotong royong lebih bersifat intrinsik, yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan atau imbalan non-ekonomi.

Gotong royong adalah suatu faham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, suatu perjuangan bantu-membantu. Gotong royong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua atau jerih payah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Dalam azas gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja rohaniyah maupun kerja jasmaniyah dalam usaha atau karya bersama yang mengandung didalamnya keinsyafan, kesadaran dan sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan. Dengan berkembangnya tata-tata kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, gotong royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat Bangsa Indonesia (Effendi, 2013). Negara gotong-royong dengan demikian adalah negara yang dipondasikan atas semangat kerjasama dan saling bantu khas Indonesia.

Pancasila sebagai Pendidikan Perdamaian dalam Pembelajaran IPS

Pancasila merupakan falsafah negara yang memiliki lima sila dimana kelimanya saling kait-mengait. Pancasila mengandung nilai-nilai yang tidak hanya berlaku untuk hati nurani bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan nasional, tetapi Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal. Pada hakikatnya kelima prinsip Pancasila sesuai dengan nilai-nilai inti yang dianut oleh UNESCO; yaitu perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Ketua Eksekutif Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman (2004: 235–240), pada *International Congress of Education for Shared Values for Intercultural and Interfaith Understanding*, berbicara tentang Pancasila sebagai kesatuan yang mengikat antar budaya dan sebagai identitas budaya bangsa di Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu menciptakan dialog antara budaya etnis, budaya daerah atau lokal, dan budaya nasional dengan berdasar semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika penting untuk dilakukan. Untuk menciptakan hal tersebut dibutuhkan usaha bersama untuk membumikan Pancasila dalam setiap lini kehidupan, terutama dalam pendidikan.

Menurut Yudi Latif (2011), dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam realitas perlu menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Fitrah pertama adalah semangat 'menuhan' atau ketakwaan kepada Tuhan, artinya meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Dengan pengakuan ini, untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memiliki kewajiban moral dan etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa.

Fitrah kedua adalah semangat kekeluargaan yang berdasarkan pada semangat gotong royong, sebagaimana Soekarno menyatakan bahwa dasar semangat mendirikan Negara Indonesia adalah semua buat semua. Fitrah ketiga adalah semangat keikhlasan dan ketulusan, yang artinya dalam mengambil keputusan yang sulit hendaknya keputusan yang diambil dilandasi maksud yang suci dan diterima dengan hati yang murni penuh dengan keikhlasan. Fitrah keempat adalah semangat

pengabdian dan tanggung jawab. Fitrah kelima adalah semangat menghasilkan yang terbaik.

Fitrah keenam adalah semangat keadilan dan kemanusiaan. Dalam Pancasila., kata 'keadilan' ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila sekaligus. Pada sila kedua, keadilan dijadikan landasan nilai perjuangan kemanusiaan, sedangkan pada sila kelima, keadilan itu dijadikan tujuan perjuangan. Fitrah ketujuh adalah semangat kejuangan. Dalam pandangan Mohammad Hatta, sebuah bangsa tidak lah eksis dengan sendirinya, melainkan tumbuh atas landasan suatu keyakinan, sikap batin yang memancarkan etos kejuangan yang perlu dibina dan dipupuk sepanjang masa. Fitrah dasar kehidupan tersebut perlu dihidupkan sebagai tenaga batin dan prasyarat moralitas yang dapat mengangkat marwah bangsa dari kerendahannya. Ketujuh fitrah dasar kehidupan tersebut sudah seharusnya menjadi pijakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian (*peace values*) dalam pendidikan di sekolah. Dalam praktiknya, ketujuh fitrah Pancasila dapat disampaikan dalam mata pelajaran yang berhubungan erat manusia sebagai bagian dari masyarakat, yaitu pembelajaran IPS.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS), pembelajaran IPS adalah pengajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan citizenship education (NCSS, 1994). Di Indonesia, IPS merupakan mata pelajaran wajib di SMP/MTs yang memadukan (*integrated*) konsep ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam komunitas global. Dalam praktik pengajarannya, pembelajaran IPS mengarahkan dan membimbing peserta didik terhadap nilai-nilai dan perilaku yang demokratis, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat global yang interdependen. Dalam dokumen Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS peserta didik harus menyadari keberagaman budaya (multikultural), mengenal lingkungan dan masyarakat secara lokal, nasional dan internasional, membentuk dan mengembangkan keterampilan sosial juga menguasai teknologi yang berkembang saat ini sebagai bagian dari komunitas internasional. Berdasarkan hal tersebut, praktik pembelajaran IPS di sekolah harus mengembangkan rasa sikap cinta tanah air (kebangsaan) untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI. Hal ini dapat dilakukan melalui intergrasi pendidikan perdamaian dalam pembelajaran IPS dengan membuat siswa sadar akan hak, tanggung jawab, dan kebebasan bersama. Pendidikan perdamaian selaras diintegrasikan dalam pembelajaran IPS karena keduanya memiliki tujuan yang sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Clarke Habibi (2005) yaitu membantu peserta didik untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.

Implementasi pendidikan perdamaian di sekolah seyogianya dilakukan dengan proses belajar yang menyenangkan. Menurut Ahmad Nurcholish (2015), setidaknya ada empat prinsip pokok yang perlu dipenuhi dalam implementasi pendidikan damai di sekolah, yaitu: 1) holistik, 2) dialog, 3) pemikiran kritis, dan 4) membentuk nilai-nilai perdamaian. Proses pengajaran pendidikan perdamaian secara holistik merupakan proses pembelajaran yang melibatkan hati, semangat, sekaligus tindakan. Dalam prosesnya, peserta didik benar-benar meresapi dan mengerti apa yang mereka pelajari, bukan hanya semata memperkaya pikiran keilmuan namun juga memperkaya hati dan kemudian mempraktikkannya melalui tindakan. Sementara itu, pengajaran melalui dialog diartikan bahwa proses pendidikan perdamaian selalu dilakukan dalam bentuk dialog bukan monolog. Dialog akan membangun suasana demokratis antara peserta didik dan guru, yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Pengajaran pendidikan perdamaian juga dirancang untuk mendorong tumbuhnya pemikiran kritis dari peserta didik, yang nantinya diharapkan dapat melahirkan

komitmen untuk berperan dalam membangun budaya damai. Komitmen tersebut bisa terbentuk pada tingkat personal dan juga dapat berkembang pada lingkungan yang lebih luas. Tujuan akhir pendidikan perdamaian adalah membentuk nilai-nilai perdamaian. Artinya, pengajaran pendidikan perdamaian diharapkan dapat menghasilkan budaya damai yang memungkinkan digali dari budaya atau kearifan lokal (local wisdom) dari tiap daerah atau dapat pula merupakan bentuk baru yang lahir dari konsensus bersama antar berbagai pihak. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila memiliki posisi strategis untuk dapat disampaikan sebagai nilai perdamaian yang bersumber dari falsafah bangsa. Ketujuh fitrah Pancasila, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yaitu semangat ketuhanan, semangat kekeluargaan, semangat keikhlasan dan ketulusan, semangat pengabdian, semangat menghasilkan yang terbaik, semangat keadilan dan kemanusiaan, serta semangat kejuangan, dapat dijadikan sebagai nilai-nilai damai yang disampaikan dalam pembelajaran IPS di kelas. Nilai-nilai tersebut dapat dihadirkan guru dalam tema sejarah perjuangan bangsa, hak asasi manusia, budaya lokal, serta tema-tema lainnya. Metode yang dapat digunakan untuk menghadirkan muatan pendidikan perdamaian bisa dilakukan dengan mengkontekstualkan sumber-sumber lokal dimana siswa tersebut tinggal. Sumber-sumber tersebut tidak hanya disampaikan sebatas pengetahuan saja, akan tetapi harus mampu menanamkan afektif dalam diri siswa. Dalam konteks pembelajaran IPS di Surakarta misalnya, guru dapat mendiskusikan bersama siswa tentang sejarah pertentangan etnis Tionghoa dan Jawa serta harmonisasi yang terjadi diantara keduanya. Melalui proses belajar yang holistik, guru dan peserta didik dapat melakukan dialog secara terbuka yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan membentuk nilai-nilai damai berdasarkan fitrah Pancasila pada peserta didik.

SIMPULAN

Pancasila merupakan basis-struktur bangsa Indonesia dimana Pancasila menjadi pandangan hidup kultural dari masyarakat. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dan mengendap di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya gotong royong sebagai khasanah kebudayaan Nusantara. Prinsip gotong royong erat kaitannya dengan substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup bangsa Indonesia. Prinsip gotong royong juga semangat Pancasila dalam konteks kekinian memiliki posisi strategis untuk disampaikan dalam proses pembelajaran IPS di kelas guna menumbuhkan budaya damai bagi peserta didik. Melalui proses belajar yang holistik, guru dan peserta didik dapat melakukan dialog secara terbuka yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan pemikiran kritis dan membentuk nilai-nilai damai berdasarkan fitrah Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syaiful. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Aziz, N. (2018, Juli 5). *Temuan BNPT tentang Paparan Radikalisme di Sejumlah Universitas Dipertanyakan*. BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353>
- Bowen, J. R. (1986). *On the political construction of tradition: Gotong Royong in Indonesia*. *The Journal of Asian Studies*, 545-561.
- Clarke-Habibi, S. (2005). *Transforming Worldviews: The Case of Education for Peace in Bosnia and Herzegovina*. *Journal of Transformative Education*, 3(1), 33–56. <https://doi.org/10.1177/1541344604270238>

- CONVEY Indonesia. (2018). *CONVEY Report (Volume 1) Kaum Muda Muslim Milenial: Hibridasi Kultural, Konservatisme, dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. MA: Pearson.
- Effendi, T. N. (2013). *Budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1-17.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. (2014). *Pendidikan Multikultural Interteligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia*. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1 (1): 89-98.
- Kartodirdjo, Sartono. (1987). *Gotong royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta. (2017). *Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Hasil Perbaikan Dokumen Sebelumnya (Lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014).
- Kusuma, A.B. (2004). *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Latif, Yudi. (2015). *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- National Council for the Social Studies. (1994). *Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Washington, D.C.: NCSS).
- Nurcholish, Ahamd. (2015). *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/acd78851-en>.
- Rachman, Arief. (2004). *Dialogue Among Cultures – The Indonesian Case*". In Cécile Parry and Paola Miranda (eds). *Proceedings of the International Congress of Education for Shared Values for Intercultural and Interfaith Understanding*, pp. 234–240. University of Adelaide, Australia, 28 November–3 December. Paris: UNESCO Interreligious Dialogue Programme of the Division for Cultural Policies and Intercultural Dialogue. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001417/141773e.pdf>
- WHO. (2015). *The Global School-Based Health Survey*. <https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/indonesia/en/>